

Kontradiksi Agitasi Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Konsep Politik Islam dalam Pembentukan Pandangan Bernegara

Hery Wahyudi Marpaung ^{1*}, Katimin ², Hasrat Efendi Samosir ³

^{1*,2,3} Program Studi Doktor Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Email: herywahyudimarpaung@gmail.com ^{1*}, katimin@uinsu.ac.id ², hasratefendisamosir@uinsu.ac.id ³

Histori Artikel:

Dikirim 21 Mei 2025; *Diterima dalam bentuk revisi* 23 Juli 2025; *Diterima* 30 Juli 2025; *Diterbitkan* 10 September 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh.

Abstrak

Penelitian ini membahas kontradiksi antara ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan prinsip politik Islam, terutama dalam hal penolakan terhadap demokrasi dan negara-bangsa. Melalui analisis wacana kritis, penelitian ini menelaah narasi HTI dalam teks-teks resmi, publikasi digital, serta pernyataan para tokohnya mengenai konsep khilafah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan politik HTI bersifat kaku, eksklusif, dan mengabaikan nilai-nilai keislaman yang bersifat inklusif, seperti musyawarah, keadilan, dan toleransi. Sikap tersebut tidak selaras dengan prinsip politik Islam yang tercermin dalam Piagam Madinah, yang menekankan kerja sama lintas kelompok serta pengakuan terhadap keberagaman. Agitasi yang dilakukan HTI turut berpengaruh pada pembentukan kesadaran ideologis yang sempit dan polarisasi di tengah masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ideologi HTI tidak hanya bertentangan dengan realitas sosial-politik Indonesia yang demokratis dan plural, tetapi juga menyimpang dari semangat politik Islam yang adaptif dan kontekstual. Oleh sebab itu, diperlukan upaya akademis dan kebijakan yang responsif serta kritis terhadap penyebaran, maupun indikasi penyebaran, ideologi eksklusif yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi Indonesia dan prinsip politik Islam, demi menjaga kohesi sosial dan keutuhan bangsa.

Kata Kunci: Agitasi Hizbut Tahrir Indonesia; Politik Islam; Pandangan Bernegara.

Abstract

This study examines the contradictions between HTI ideology and Islamic political principles, particularly the rejection of democracy and the nation-state. Utilizing critical discourse analysis, this research explores HTI's narrative in official texts, digital publications, and statements by its figures regarding the concept of the caliphate. The results indicate that HTI's political views are rigid, exclusive, and disregard inclusive Islamic values such as deliberation, justice, and tolerance. Such views are not aligned with the principles of Islamic politics reflected in the Charter of Medina, which emphasizes cross-group cooperation and recognition of diversity. HTI's agitation also contributes to the formation of narrow ideological awareness and polarization within society. The study concludes that HTI's ideology is not only contrary to Indonesia's democratic and pluralistic socio-political reality, but also deviates from the spirit of Islamic politics, which is adaptive and contextual. Therefore, academic and policy measures that are responsive and critical to the dissemination, as well as indications of the dissemination, of exclusive ideologies contrary to Indonesian democratic values and Islamic political principles are necessary to maintain social cohesion and national integrity.

Keyword: Hizb ut-Tahrir Agitation Indonesia; Islamic Politics; State View.

1. Pendahuluan

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan bagian dari *Hizb ut-Tabrir*, sebuah organisasi transnasional yang didirikan oleh Taqiuddin an-Nabhani pada tahun 1953 di Palestina. Di Indonesia, HTI mulai menunjukkan eksistensinya sejak awal 1980-an melalui aktivitas dakwah di kampus, penyelenggaraan seminar, dan pemanfaatan media digital. Menurut Muhtadi (2009) serta Chaqoqo dan Ma'mun (2022), HTI memiliki tujuan utama untuk menegakkan khilafah Islamiyah sebagai satu-satunya sistem pemerintahan yang dinilai sesuai dengan ajaran Islam. Dengan pendekatan ideologis yang kuat, HTI berusaha mengubah sistem politik nasional, sehingga berbeda dari kelompok-kelompok Islam lainnya yang cenderung lebih adaptif terhadap demokrasi.

Iqbal dan Zulkifli (2016) serta Karagiannis (2022) menerangkan bahwa HTI secara terang-terangan menolak konsep demokrasi dan negara-bangsa, yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka mempromosikan penerapan syariah secara total melalui khilafah, yang diyakini sebagai jalan menuju kejayaan umat Islam. Dakwah dan propaganda HTI disebarkan melalui berbagai media, termasuk media sosial, sebagai alat strategis untuk menjangkau khalayak luas. Meskipun tidak menggunakan kekerasan, ideologi eksklusif yang mereka bawa menimbulkan kekhawatiran, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan demokratis.

Hal serupa juga diterangkan oleh Muhtadi (2009) dan Azman (2018), bahwa pandangan politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara tegas menolak sistem demokrasi dan pemisahan antara agama dan negara. HTI meyakini bahwa demokrasi bertentangan dengan ajaran Islam karena menempatkan kedaulatan di tangan manusia, bukan pada hukum Allah. Bagi mereka, bentuk negara yang sah hanyalah khilafah, yaitu sebuah sistem kepemimpinan tunggal bagi umat Islam sedunia yang dijalankan oleh seorang khalifah dengan menerapkan syariah secara menyeluruh dan tanpa kompromi. Pandangan ini tidak hanya didasari pada aspek normatif, tetapi juga disertai pembenaran teologis yang merujuk pada dalil fikih dan sejarah Islam.

Nurjaman (2023) serta Iqbal dan Zulkifli (2016) mengemukakan bahwa HTI juga menolak konsep negara-bangsa (*nation-state*) karena dianggap sebagai warisan kolonial yang memecah belah umat Islam. Mereka menyatakan bahwa dalam perspektif HTI, nasionalisme menjadi penghalang bagi terwujudnya persatuan umat secara global. Oleh karena itu, HTI menyerukan penghapusan batas-batas teritorial dan menggantinya dengan institusi khilafah yang universal. Pandangan ini tentunya bertentangan secara langsung dengan konsep kedaulatan negara yang berbasis sistem demokrasi Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai keberagaman dan persatuan dalam kebhinekaan.

Muthohirin (2015) dan Yani *et al.* (2023) menyatakan bahwa agitasi yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memang tidak bersifat kekerasan secara fisik, namun sarat dengan muatan radikalisme melalui penyebaran narasi eksklusif tentang sistem Islam. Ide tentang khilafah disebarluaskan melalui forum kajian, media sosial, dan aksi-aksi massa yang menyoroti ketidakpuasan terhadap sistem politik demokrasi. Kampanye HTI sering kali menyudutkan demokrasi sebagai biang kemerosotan umat Islam dan menampilkan sistem khilafah sebagai satu-satunya solusi.

Setia (2021) dan Toyibah (2022) mencatat bahwa jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip dalam Piagam Madinah yang dirancang oleh Nabi Muhammad Saw., pandangan politik HTI menunjukkan ketidaksesuaian yang mendasar. Piagam Madinah menekankan kerja sama lintas komunitas—Muslim, Yahudi, dan suku-suku lain—dalam sebuah kesepakatan sosial-politik yang menjunjung hak dan kewajiban bersama. HTI, sebaliknya, mengedepankan pandangan bahwa hanya hukum Islam yang boleh diberlakukan, tanpa membuka ruang kompromi atau pengakuan atas keberagaman. Peneliti menggarisbawahi bahwa sikap politik HTI bertentangan dengan semangat inklusivitas dan kohesi sosial yang dicontohkan Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat Madinah.

Dengan mempertimbangkan konteks sejarah Islam, pandangan politik HTI tampak menyempitkan makna politik Islam yang pada masa Rasulullah Saw. justru bersifat inklusif dan kolaboratif. Sebagaimana dijelaskan oleh Hamdi (2023) dan Karagiannis & McCauley (2006), HTI mengabaikan realitas sosial-politik modern yang multikultural dan kompleks. Gagasan khilafah yang mereka bawa bersifat kaku dan tertutup terhadap perbedaan, sehingga berpotensi mengucilkan

kelompok lain, termasuk sesama umat Islam yang tidak sejalan secara ideologis. Hal ini mengaburkan nilai-nilai dasar dalam sistem politik Islam awal, seperti musyawarah, keadilan, dan keterbukaan terhadap kebinekaan, yang justru menjadi fondasi utama masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad Saw.

Sejumlah penelitian telah membahas HTI dari berbagai sudut pandang. Muhtadi (2009) menyimpulkan bahwa HTI berkembang sebagai gerakan ideologis yang membawa narasi khilafah di Indonesia. Setia (2021) menyoroti penolakan HTI terhadap pluralisme, sementara Karagiannis (2022) menganalisis potensi ancaman HTI secara global. Di sisi lain, Hamdi (2023) meneliti pengaruh HTI terhadap mahasiswa, dan Aswar (2024) membahas narasi anti-kapitalisme yang mereka usung. Meskipun bermanfaat, sebagian besar kajian ini masih bersifat deskriptif dan belum menyentuh secara mendalam aspek kontradiksi antara ideologi HTI dengan prinsip-prinsip dasar politik Islam secara konseptual dan teoretis.

Keterbatasan utama dari berbagai penelitian sebelumnya terletak pada absennya pendekatan kritis yang secara mendalam membandingkan ideologi HTI dengan teori politik Islam yang lebih luas, terutama dalam bingkai sosial-politik yang menekankan pluralisme, seperti Piagam Madinah. Sebagian besar kajian cenderung fokus pada aspek radikalisme atau pola dakwah HTI, namun belum menyentuh secara menyeluruh bagaimana kontradiksi internal dalam ideologi HTI berdampak pada legitimasi mereka dalam konteks negara-bangsa seperti Indonesia. Padahal, isu ini sangat penting mengingat organisasi seperti HTI pernah hidup dalam realitas politik yang bertumpu pada Pancasila dan demokrasi, yang jelas bertolak belakang dengan cita-cita khilafah yang mereka perjuangkan.

Oleh karena itu, penelitian berjudul "Kontradiksi Agitasi Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Konsep Politik Islam dalam Pembentukan Pandangan Bernegara" menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini ditujukan untuk mengisi kekosongan (*gap research*) dalam studi-studi sebelumnya dengan menganalisis secara kritis ketidaksesuaian antara gagasan politik HTI dan prinsip-prinsip dasar politik Islam yang bersifat toleran, inklusif, serta kontekstual. Dengan menggunakan pendekatan analitis-kritis yang berpijak pada sumber-sumber primer ajaran politik Islam, studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memahami dinamika politik Islam kontemporer di Indonesia secara lebih objektif dan menyeluruh. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mengidentifikasi serta mengkritisi potensi munculnya pandangan radikal yang menyimpang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis untuk menelaah secara mendalam kontradiksi ideologis dalam agitasi politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap relasi kuasa, ideologi, serta konstruksi makna dalam narasi HTI terhadap konsep politik Islam dan negara. Analisis dilakukan terhadap teks-teks resmi, publikasi digital, serta pernyataan tokoh HTI yang berkaitan dengan pandangan kenegaraan. Sebagaimana diungkapkan oleh Fairclough (1995), metode ini efektif untuk mengkaji praktik diskursif yang memengaruhi struktur sosial dan politik dalam masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Agitasi ideologis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) didasarkan pada keyakinan bahwa khilafah merupakan satu-satunya sistem pemerintahan yang sah menurut syariat Islam. Pandangan ini tertuang dalam teks-teks resmi seperti *Struktur Negara Khilafah* dan *Sistem Pemerintahan Islam* yang diterbitkan oleh HTI Press. Dalam kedua buku tersebut, HTI secara tegas menyatakan bahwa demokrasi adalah

sistem kufur karena menyerahkan kedaulatan kepada manusia, bukan kepada hukum Allah. Pandangan ini tidak sekadar retorika, tetapi menjadi dasar penolakan mereka terhadap legitimasi negara-bangsa, termasuk Indonesia yang menganut sistem demokrasi Pancasila (HTI, 2007; HTI Press, 2001). Selain buku resmi, HTI juga menyebarkan ideologinya melalui publikasi digital seperti artikel berjudul *Mengapa Harus Khilafah?*. Artikel ini menyampaikan narasi bahwa segala bentuk krisis yang dihadapi umat Islam—mulai dari kemiskinan, ketimpangan, hingga konflik sosial—disebabkan oleh penerapan sistem selain syariah. Khilafah diposisikan sebagai solusi tunggal yang menyeluruh, tanpa memberikan ruang dialog terhadap alternatif lain. Hal ini diperkuat oleh pernyataan tokoh HTI, Ismail Yusanto (HTI Press, 2001), yang menyebut demokrasi sebagai sistem sekuler yang gagal menyatukan umat Islam secara politik maupun ideologis.

Dalam dokumen resmi *Kitab Nidzam al-Islam*, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyatakan bahwa khilafah bukanlah sekadar pilihan politik, melainkan kewajiban syar’i yang harus diperjuangkan oleh seluruh umat Islam. Menurut mereka, setiap Muslim yang tidak ikut memperjuangkan khilafah dianggap berdosa. Pernyataan ini tidak hanya menjadi dasar keyakinan ideologis, tetapi juga memperkuat tekanan moral terhadap pengikutnya, menjadikan perjuangan politik sebagai bagian dari ibadah. Hal ini juga ditegaskan dalam buku *Agenda Khilafah: Dari Indonesia untuk Dunia*, di mana HTI menuliskan bahwa “mendirikan khilafah adalah harga mati” sebagai bentuk penolakan total terhadap sistem demokrasi dan Pancasila (HTI, 2003; *Al-Wa’ie Magazine*, 2010). Dalam berbagai forum dakwah dan publikasi seperti *Buletin Al-Islam* serta situs resmi hizbut-tahrir.or.id, HTI secara terbuka menyuarakan bahwa umat Islam tidak boleh menunjukkan loyalitas kepada sistem pemerintahan selain khilafah. Narasi semacam ini tidak hanya membatasi ruang wacana publik, tetapi juga menolak perbedaan pandangan dalam internal umat Islam sendiri. Akibatnya, terbentuk dikotomi antara mereka yang mendukung khilafah dan mereka yang dianggap menolak Islam. Ini mencerminkan bahwa agitasi HTI menasar bukan hanya struktur politik negara, tetapi juga pembentukan kesadaran ideologis yang eksklusif di tengah masyarakat (HTI, 2011; *Al-Islam*, 2013).

Tabel 1. Agitasi Ideologis HTI

Aspek Agitasi Ideologis	Sumber	Gagasan	Referensi
Penolakan terhadap demokrasi	Buku: Struktur Negara Sistem Pemerintahan Islam	Demokrasi adalah sistem kufur, bertentangan dengan syariat Islam	HTI, 2007; HTI Press, 2001
Narasi krisis dan solusi tunggal	Publikasi digital: Artikel 'Mengapa Harus Khilafah?'	Krisis umat disebabkan sistem non-syariah, khilafah solusi mutlak	HTI Press, 2001
Khilafah sebagai kewajiban syar’i	Kitab Nidzam al-Islam, Agenda Khilafah: Dari Indonesia untuk Dunia	Setiap Muslim wajib memperjuangkan bagian dari ibadah khilafah	HTI, 2003; Al-Wa’ie Magazine, 2010
Eksklusivisme ideologis	Buletin Al-Islam, situs hizbut-tahrir.or.id	Tidak boleh loyal pada sistem selain khilafah; yang tidak mendukung dianggap menolak Islam	HTI, 2011; Al-Islam, 2013

Sumber: Peneliti (2025).

Strategi penyebaran gagasan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dilakukan secara sistematis dan terorganisir, dengan memanfaatkan ruang publik sebagai sarana dakwah ideologis. Salah satu strategi utama mereka adalah menasar kalangan mahasiswa melalui pembentukan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan kelompok-kelompok kajian sejak awal 1990-an. HTI memandang mahasiswa sebagai agen perubahan yang memiliki potensi intelektual dan kepemimpinan di masa depan. Menurut Hamdi (2023), ruang akademik dijadikan titik strategis untuk menanamkan ide-ide khilafah secara

intensif, karena kalangan muda dianggap lebih terbuka terhadap wacana alternatif yang menantang sistem politik mapan.

Selain itu, HTI juga memaksimalkan penggunaan media digital untuk memperluas jangkauan ideologi mereka. Melalui situs resmi seperti hizbut-tahrir.or.id dan khilafah.id, mereka mendistribusikan berbagai konten seperti artikel, infografis, hingga video dakwah yang dikemas secara menarik. Muthohirin (2015) mencatat bahwa HTI sangat adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, termasuk dalam memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook dan Twitter. Mereka membangun komunitas daring yang aktif menyebarkan narasi keislaman politis, sering kali dengan bahasa yang emosional dan mengangkat isu-isu global untuk membangun rasa krisis dan urgensi di tengah umat.

HTI secara konsisten menyelenggarakan berbagai acara publik berskala besar sebagai bagian dari strategi penyebaran gagasan politik mereka. Beberapa agenda seperti *Konferensi Rajab*, *Muktamar Khilafah*, dan *Long March Nasional* menjadi ajang untuk menunjukkan kekuatan massa sekaligus menanamkan simbol perjuangan khilafah di ruang publik. Dalam acara tersebut, orator HTI menyampaikan pidato-pidato bernada politis yang secara tegas mengkritik demokrasi dan menyerukan penegakan khilafah sebagai satu-satunya solusi. Karagiannis (2022) menyebut strategi ini sebagai bentuk *soft mobilization*—yakni upaya mobilisasi massa yang tidak bersifat kekerasan, tetapi mampu memengaruhi persepsi dan emosi publik secara efektif.

Selain kegiatan massa, strategi penting lainnya adalah produksi literatur dakwah yang dikemas dalam bentuk buletin mingguan, buku ideologis, dan majalah seperti *Al-Wa'ie*. Materi ini didistribusikan secara sistematis melalui jaringan internal HTI yang tersusun dari tingkat pusat hingga lokal. Iqbal dan Zulkifli (2016) mencatat bahwa HTI berhasil menggabungkan metode klasik dakwah dengan teknologi komunikasi modern, membentuk sistem penyebaran informasi yang cepat dan terkonsolidasi. Dengan narasi yang seragam dan terus diulang, HTI membangun pemahaman tunggal tentang Islam politik, yang pada akhirnya memperkuat militansi ideologis di kalangan pendukungnya.

3.2 Pembahasan

Peneliti mencermati bahwa agitasi ideologis dan strategi penyebaran gagasan yang dijalankan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak sekadar menyasar perubahan sistem politik, melainkan juga berupaya membentuk kesadaran kolektif yang eksklusif di tengah umat Islam. Melalui berbagai media, publikasi resmi, dan pengaruh di ruang publik, HTI membangun narasi tunggal bahwa hanya khilafah yang sah secara syar'i dan mampu menyelesaikan krisis umat. Hal ini berdampak pada polarisasi pandangan dalam masyarakat, terutama ketika ideologi khilafah dijadikan standar untuk menilai keislaman seseorang atau legitimasi suatu sistem pemerintahan. Dengan demikian, pemahaman terhadap pola agitasi dan strategi HTI menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan kontra-radikalisasi yang tepat. Negara perlu memperkuat pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan dialogis, dengan menekankan pentingnya politik Islam yang kontekstual, toleran, serta sesuai dengan prinsip-prinsip kebangsaan. Kesadaran historis terhadap nilai-nilai inklusif dalam politik Islam, seperti yang tertuang dalam Piagam Madinah, dapat menjadi landasan yang kokoh untuk menanggapi penyebaran ideologi HTI secara cerdas dan konstruktif.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengusung ideologi yang berfokus pada pembentukan khilafah sebagai satu-satunya sistem pemerintahan yang dianggap sah secara syar'i. Dalam dokumen-dokumen resmi seperti *Struktur Negara Khilafah* dan *Sistem Pemerintahan Islam*, HTI menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem kufur karena memberikan kedaulatan kepada manusia, bukan kepada hukum Allah (HTI Press, 2001; HTI, 2007). Oleh karena itu, HTI menolak legitimasi negara-bangsa modern, termasuk Indonesia, yang berbasis pada sistem demokrasi Pancasila. Ideologi ini membentuk kerangka berpikir yang kaku dan eksklusif terhadap alternatif sistem pemerintahan lain.

Lebih dari sekadar pandangan politik, ideologi HTI juga memiliki dimensi moral yang kuat. Dalam *Kitab Nidzam al-Islam* dan buku *Agenda Khilafah: Dari Indonesia untuk Dunia*, HTI menyatakan bahwa memperjuangkan khilafah adalah kewajiban syar'i bagi setiap Muslim. Mereka yang tidak mendukungnya dianggap berdosa dan tidak loyal terhadap ajaran Islam (HTI, 2003; *Al-Wa'ie*

Magazine, 2010). Dengan cara ini, HTI tidak hanya mengideologisasi politik, tetapi juga memobilisasi keyakinan keagamaan untuk memperkuat dukungan terhadap perjuangan politik mereka secara total.

Di sisi lain, prinsip politik Islam dalam literatur klasik dan kontemporer menekankan pentingnya keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*shura*), dan kemaslahatan umum (*maslahah*) sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan. Para pemikir seperti Al-Mawardi dalam *Al-Abkam al-Sultaniyyah* menjelaskan bahwa bentuk pemerintahan dalam Islam bukanlah sesuatu yang tunggal, tetapi dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan historis umat Islam (Al-Mawardi, 1989). Dengan demikian, politik Islam bersifat fleksibel dan terbuka terhadap interpretasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Prinsip-prinsip dalam politik Islam juga mengedepankan etika dialog dan toleransi terhadap perbedaan pandangan di antara umat. Konsep *ummah* dalam Islam tidak hanya dimaknai secara politis, tetapi juga sebagai komunitas moral yang menjunjung nilai inklusif dan keadilan sosial. Gagasan ini diperkuat dalam Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang mengakomodasi keberagaman suku dan agama dalam satu tatanan sosial yang harmonis (Esposito, 1998). Dalam kerangka ini, politik Islam tidak identik dengan sistem tunggal seperti khilafah, tetapi bersifat terbuka terhadap bentuk pemerintahan yang menjunjung nilai-nilai dasar Islam. Kontradiksi antara ideologi HTI dan prinsip politik Islam terlihat jelas pada cara HTI mengklaim khilafah sebagai satu-satunya sistem yang sah. Dalam konteks sejarah, sistem khilafah sendiri mengalami berbagai transformasi dan tidak pernah tunggal dalam bentuknya. Namun, HTI menolak keragaman tersebut dan menyatakan bahwa hanya model khilafah versi mereka yang benar, sehingga menutup ruang interpretasi dan ijtihad dalam politik Islam (Karagiannis, 2022). Ini bertentangan dengan semangat politik Islam yang plural dan kontekstual.

Selain itu, pendekatan HTI yang eksklusif terhadap umat Islam, di mana mereka yang tidak mendukung khilafah dianggap menolak Islam, menciptakan polarisasi internal. Politik Islam justru menekankan pentingnya ukhuwah dan menghormati perbedaan ijtihad dalam bernegara (Abou El Fadl, 2001). Dengan mengabaikan prinsip-prinsip ini, HTI mendorong fragmentasi sosial dan melemahkan kohesi umat. Hal ini menimbulkan dampak serius bagi integrasi nasional, khususnya di negara majemuk seperti Indonesia. Strategi agitasi HTI yang menysar mahasiswa dan ruang publik juga menandakan bahwa perjuangan mereka lebih bersifat ideologis daripada solutif. Melalui narasi krisis dan solusi tunggal, HTI menyederhanakan kompleksitas masalah sosial-politik menjadi dikotomi antara Islam dan non-Islam. Padahal, prinsip politik Islam mendorong solusi yang berbasis pada musyawarah dan pendekatan gradual, bukan perubahan revolusioner berbasis tekanan ideologis (Hamdi, 2023; Muthohirin, 2015). Ini menunjukkan perbedaan fundamental antara pendekatan HTI dan prinsip politik Islam yang lebih inklusif. HTI menolak sistem demokrasi dengan alasan bertentangan dengan syariat, namun dalam banyak pengalaman negara mayoritas Muslim, prinsip-prinsip demokrasi dapat diselaraskan dengan nilai-nilai Islam. Sejumlah negara seperti Indonesia dan Tunisia menunjukkan bahwa sistem demokrasi dapat memberikan ruang bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam politik tanpa kehilangan identitas keagamaannya (Esposito & Voll, 1996). Maka dari itu, sikap HTI yang menolak demokrasi secara total menunjukkan ketidakseimbangan dalam memahami dinamika politik Islam yang kompleks dan penuh nuansa.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa agitasi ideologis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam mempromosikan khilafah bertentangan secara fundamental dengan prinsip-prinsip dasar politik Islam yang bersifat inklusif, toleran, dan kontekstual. Melalui retorika eksklusif dan strategi penyebaran yang sistematis di ruang publik, HTI membentuk pandangan bernegara yang menolak sistem demokrasi dan pluralisme sebagaimana terkandung dalam Piagam Madinah. Ideologi HTI tidak hanya mengabaikan dinamika sosial-politik Indonesia yang majemuk, tetapi juga menyempitkan makna politik Islam yang sejatinya fleksibel dan dialogis. Penelitian ini menegaskan perlunya

pendekatan kritis dan edukatif dalam menangkal penyebaran paham radikal HTI, serta mendorong pemahaman politik Islam yang selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan keislaman.

5. Daftar Pustaka

- About El Fadl, K. (2001). *Speaking in God's name: Islamic law, authority and women*. Oneworld Publications.
- Al-Islam. (2013). *Buletin Al-Islam* (Edisi 670). Hizbut Tahrir Indonesia.
- Al-Islam. (2013). *Buletin Al-Islam* (Edisi khusus). Hizbut Tahrir Indonesia.
- Al-Mawardi. (1989). *Al-Abkam al-Sultaniyyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Wa'ie Magazine. (2010). *Edisi khusus Khilafah*. Hizbut Tahrir Indonesia.
- Al-Wa'ie Magazine. (2010). *Khilafah dan solusi dunia Islam*. HTI Press.
- Aswar, H. (2024). Comparative analysis of anti-capitalist narratives in Hizb ut-Tahrir movements in Indonesia and Malaysia. *Dialogia*, 22(1), 1–22. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v22i1.8090>
- Azman, A. (2018). Gerakan dan pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 7(1), 99–113. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5329>
- Chaqoqo, S., & Ma'mun, S. (2022). The Islamic discourses of Indonesian Islamist organizations. *El Harakah*, 24(1), 109–125. <https://doi.org/10.18860/eh.v24i1.16616>
- Esposito, J. L. (1998). *Islam: The straight path* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (1996). *Islam and democracy*. Oxford University Press.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Hamdi, A. (2023). The radicalization of contemporary educated Indonesian: A case study of university students in Yogyakarta. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 44(1). <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2023.44.1.17>
- Hamdi, S. (2023). *Politik Islam kontemporer di Indonesia*. Genta Publishing.
- Hizbut Tahrir Indonesia. (2003). *Agenda khilafah: Dari Indonesia untuk dunia*. HTI Press.
- Hizbut Tahrir Indonesia. (2007). *Struktur negara khilafah*. HTI Press.
- HTI Press. (2001). *Sistem pemerintahan Islam*. Hizbut Tahrir Indonesia Press.
- HTI. (2003). *Agenda Khilafah: Dari Indonesia untuk dunia*. Hizbut Tahrir Indonesia.
- HTI. (2007). *Struktur negara Khilafah*. Hizbut Tahrir Indonesia.

- Iqbal, A., & Zulkifli, Z. (2016). Islamic fundamentalism, nation-state and global citizenship: The case of Hizb ut-Tahrir. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 6(1), 35–61. <https://doi.org/10.18326/ijims.v6i1.35-61>
- Karagiannis, E. (2022). Hizb ut-Tahrir. In D. M. Snow (Ed.), *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements* (2nd ed.). <https://doi.org/10.1002/9780470674871.wbespm308.pub2>
- Karagiannis, E., & McCauley, C. (2006). Hizb ut-Tahrir al-Islami: Evaluating the threat posed by a radical Islamic group that remains nonviolent. *Terrorism and Political Violence*, 18(2), 315–334. <https://doi.org/10.1080/09546550600570168>
- Muhtadi, B. (2009). The quest for Hizbut Tahrir in Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 37(4), 623–645. <https://doi.org/10.1163/156853109x460219>
- Muthohirin, A. (2015). *Media Islam dan dakwah digital*. LP3ES.
- Muthohirin, N. (2015). Radikalisme Islam dan pergerakannya di media sosial. *Afkaruna*, 11(2), 240–259. <https://doi.org/10.18196/aijis.2015.0050.240-259>
- Nurjaman, A. (2023). Islamic movements and the future of democracy in post-Suharto Indonesia era. *Hayula*, 7(1), 33–50. <https://doi.org/10.21009/hayula.007.01.03>
- Setia, P. (2021). Atas nama Islam: Kajian penolakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap pluralisme. *Aplikasia*, 21(2), 115–136. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v21i2.2571>
- Toyibah, D. (2022). Indonesian Muslim in the Netherlands: Responding to nationalism, Islamism, democracy, and pluralism. *Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya*, 6(2), 165–180. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v6i2.19746>
- Yani, M. T., Faidah, M., Ridlwan, A. A., Syafa'at, M., & Azizah, S. N. (2023). Preventative Strategy to Solve Radicalism in University: The Case Study in State University of Surabaya, Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(3), 152-161. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0068>.